Nama : Desbi Ananda Putri

NPM : 2012011298

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang merajalela sudah merugikan keuangan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi adalah fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Maka diperlukan upaya yang luar biasa dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Salah satu upayanya adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Adapun rumusan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai penerapan hukum tindak pidana dalam tindak pidana korupsi. Identifikasi Masalah yaitu kendala yang timbul dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Kedua upaya yang dilakukan untuk memperbaharui perampasaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum indonesia.

Metode dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Kesimpulannya, Kendala yang timbul dalam perampasan aset adalah instrumen sistem hukum Indonesia yang belum memadai terutama dalam hukum dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain mengenai perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat dilakukan secara universal dan efektif. Selain itu fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Lalu, diperlukannya memperbaharui sistem hukum indonesia tentang perampasan dan pengembalian aset.

Kata kunci : Korupsi, Tindak Pidana Korupsi